

# REFERENSI

No. 05/ref.PKA/APBN/V/2019

Perkembangan Realisasi PNBP  
Sumber Daya Alam

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



# **PERKEMBANGAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM (PNBP SDA)**

Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.  
Mujiburrahman, S.E., M.Si.  
Satrio Arga Effendi, S.E. \*)

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh Orang Pribadi atau Badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengelolaan PNBP diatur dalam :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018,
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018, objek PNBP dikelompokkan dalam 6 klaster. Pengelompokan klaster objek PNBP dapat dilihat pada gambar 1. Sementara itu, dalam struktur APBN, kelompok PNBP dibedakan atas penerimaan sumber daya alam (SDA Migas dan SDA Nonmigas), Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (PKND), PNBP Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Apabila jenis PNBP belum tercakup dalam jenis-jenis PNBP ini, kecuali yang telah diatur dengan Undang-Undang, dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Contohnya, PP No.35 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

---

\*) Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI

**Gambar 1. Objek Penerimaan Negara Bukan Pajak**

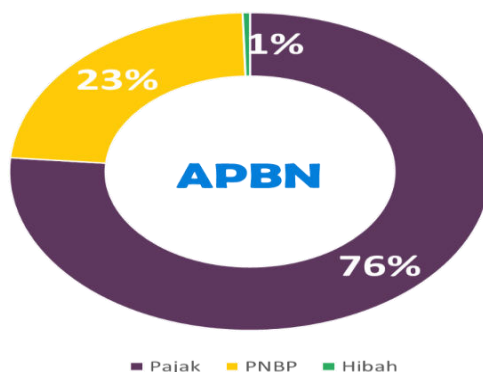


Sumber: Kemenkeu

### A. PERKEMBANGAN REALISASI PNBP

PNBP merupakan kontributor pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan pajak, dengan rata-rata menyumbang 23 persen selama satu dekade terakhir, sementara penerimaan terkecil berasal dari Dana Hibah atau hanya satu persen. Sedangkan, penerimaan pajak masih mendominasi sebagai penyumbang utama penerimaan negara atau berkontribusi sebesar 76 persen terhadap penerimaan negara secara keseluruhan. (Gambar 2).

**Gambar 2. Rata-Rata Kontribusi Penerimaan Negara 2009-2018**



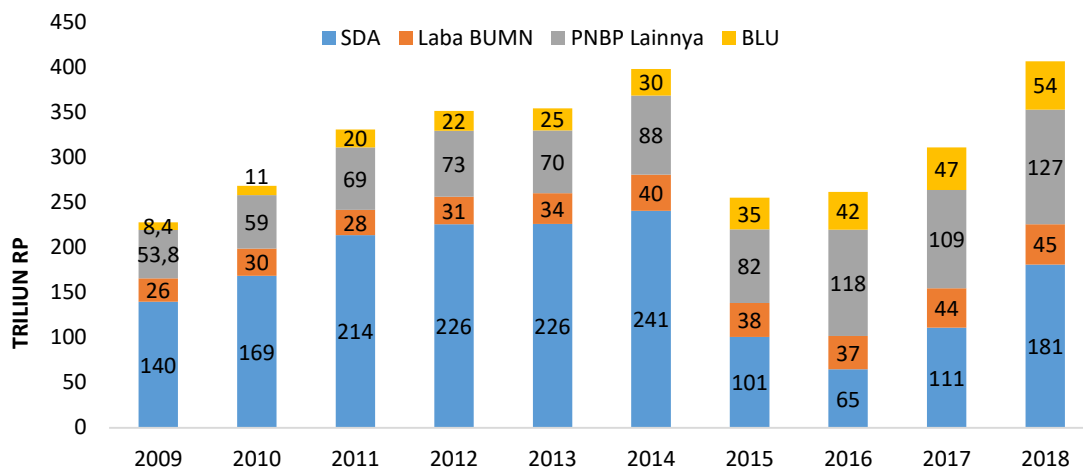
Sumber: Kemenkeu

Perkembangan realiasi PNBP dapat dilihat pada gambar 3. Dari gambar tersebut terlihat bahwa penerimaan PNBP fluktuatif sejak tahun 2009. Penerimaan PNBP menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2014 dengan total penerimaan sebesar Rp398,6 triliun atau naik sebesar 75 persen dari tahun 2009. Namun pada tahun 2015,

penerimaan PNBП turun sangat signifikan sebesar minus 36 persen atau menjadi Rp256,4 triliun. Selama periode 2016-2018, penerimaan PNBП kembali menunjukkan kenaikan masing-masing 2,19 dan 31 persen.

Tidak hanya meningkat, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2018 juga melebihi target yang ditetapkan. Dengan penerimaan sebesar Rp407 triliun atau 148 persen dari target Rp257 triliun, membuat realisasi PNBП tahun 2018 menjadi yang terbesar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sementara itu, realisasi PNBП terendah dicapai pada tahun 2009 dengan total penerimaan sebesar Rp228,02 triliun.

Penerimaan PNBП selama kurun waktu 2009-2018 hampir seluruhnya didominasi oleh penerimaan SDA (Migas dan Non Migas) dengan rata-rata menyumbang 52,2 persen dari total PNBП. Dalam satu dekade terakhir, sektor SDA rata-rata menyumbang Rp167,5 triliun atau 52,83 persen. Sektor PNBП lainnya menyumbang penerimaan PNBП terbesar kedua sebesar 26,78 persen atau rata-rata Rp84,9 triliun. Selanjutnya laba BUMN rata-rata menyumbang Rp35,31 triliun atau 11,14 persen. Penerimaan PNBП yang berasal dari BLU rata-rata menyumbang Rp29,33 triliun atau sebesar 9,25 persen



**Gambar 3. Perkembangan Realisasi PNBП 2009-2018**

Sumber: LKPP 2009-2017 dan APBN Kita 2019

Akan tetapi, PNBП lainnya sempat menggantikan dominasi perolehan PNBП SDA dengan kontribusi sebesar 45 persen atau Rp118 triliun dari total penerimaan PNBП 2016, pada saat yang sama PNBП SDA hanya menyumbang 25 persen atau hanya Rp65 triliun. Pada saat realisasi penerimaan total PNBП meningkat, penerimaan SDA justru turun sebesar negatif 64 persen. Penerimaan negara bukan pajak sangat bergantung

pada harga komoditas utama dunia terutama minyak bumi dan batubara. Penurunan harga minyak bumi dan batubara selama periode tahun 2014-2016, serta peningkatan harga pada periode tahun 2017-2018 berpengaruh signifikan pada naik dan turunnya PNBP.

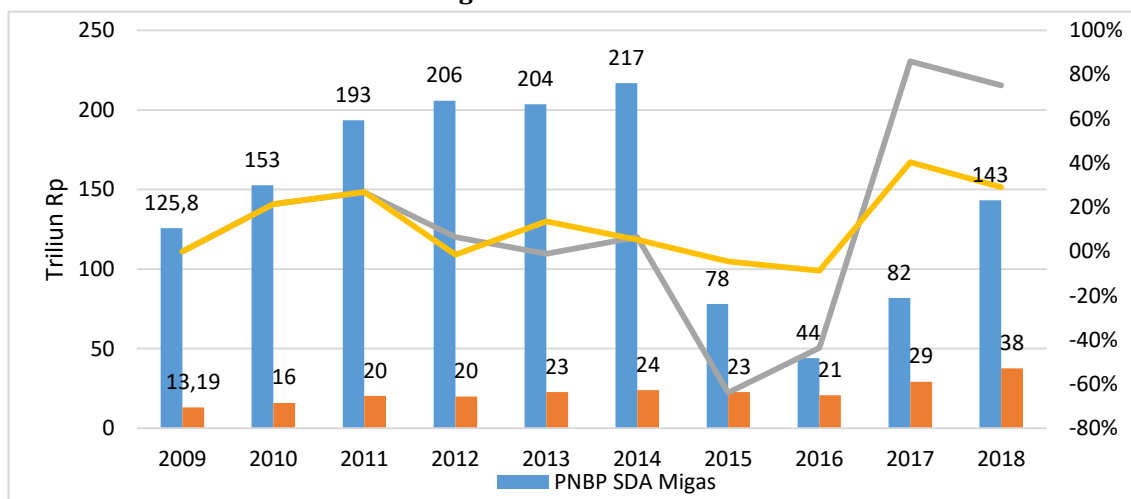
## B. PERKEMBANGAN REALISASI PNBP SDA

Menurut struktur APBN, PNBP SDA terdiri dari PNBP Migas dan PNBP Non Migas. PNBP Migas terdiri dari PNBP Minyak Bumi dan PNBP Gas Bumi. Sedangkan, PNBP Non Migas terdiri dari Mineral dan Batubara (Minerba), PNBP Kehutanan, PNBP Perikanan dan PNBP Panas Bumi. Beberapa regulasi yang mengatur pengelolaan PNBP Pajak SDA Migas antara lain:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
- PP Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Sendiri dan Kontrak Kerja Sama,
- PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas,
- PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan PPh di Bidang Usaha Hulu Migas
- Kontrak Kerja Sama (*Contract Production Sharing*).

Pendapatan SDA Migas memberikan kontribusi paling besar terhadap total PNBP yang diperoleh dari kegiatan usaha hulu sektor migas. Dalam sepuluh tahun terakhir, PNBP bergerak dinamis dengan fluktuasi terbesar terjadi di tahun 2015 hingga 2016. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia harus menghadapi tantangan penurunan tren harga komoditas, dimana hal tersebut secara langsung berpengaruh terhadap penerimaan APBN.

Gambar 4. Perkembangan Realisasi PNBP SDA 2009-2018





Sumber : LKPP 2009-2017 dan APBN Kita 2019

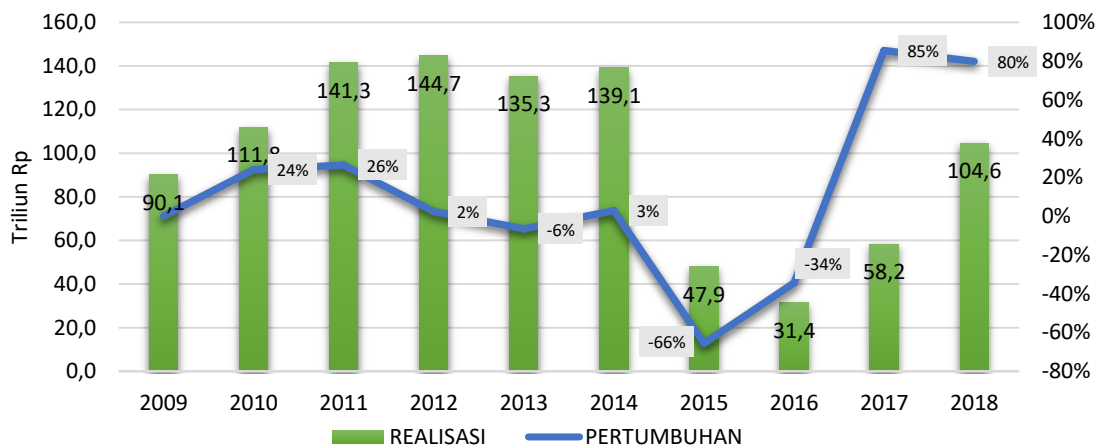
PNBP SDA migas mengalami penurunan sebesar negatif 64 persen di tahun 2015 dan negatif 44 persen di tahun 2016. Meski tidak sebesar SDA Migas, penerimaan SDA non migas juga terkena dampaknya, dengan penurunan penerimaan sebesar minus 5 persen dan minus 9 persen di tahun 2015 dan 2016. Penurunan penerimaan tersebut disebabkan oleh melemahnya ICP. Akan tetapi, setelah harga minyak mulai mengalami perbaikan pada tahun 2017, pendapatan SDA migas kembali meningkat.

Realisasi PNBP SDA Migas tertinggi terjadi di tahun 2014, dengan penerimaan sebesar Rp217 Triliun. Sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 86 persen dari penerimaan tahun sebelumnya. Tidak seperti SDA Migas yang sangat fluktuatif, sejak tahun 2009 hingga 2018 PNBP SDA Non Migas mengalami tren meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,5 persen, meskipun di tahun 2015 dan 2016 sempat mengalami penurunan. Di tahun 2017, PNBP SDA Non Migas mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 40 persen dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya.

### 1. Perkembangan Realisasi PNBP SDA Minyak Bumi

PNBP sektor Minyak Bumi mengalami fluktuasi terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Data yang disajikan pada Gambar 5 menunjukkan PNBP minyak bumi tahun 2009-2011 tumbuh positif dari Rp90,1 triliun menjadi Rp141,3 triliun. Di tahun 2012 hingga 2014 tren realisasi cenderung stabil, dengan *volatility range* antara Rp135 triliun hingga Rp145 triliun.

Gambar 5. Perkembangan Realisasi PNBP Minyak Bumi 2009-2018



Sumber: LKPP 2009-2017 dan APBN Kita 2019

Di tahun 2015, realisasi PNBPN SDA Minyak Bumi mengalami penurunan drastis sebesar negatif 66 persen dari realisasi tahun sebelumnya, dengan penerimaan hanya sebesar Rp47,9 triliun dari target Rp61,5 triliun. Penurunan realisasi terulang kembali di tahun 2016 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp31,4 triliun dari target yang ditetapkan Rp51,3 triliun, dan juga turun negatif 34 persen dari realisasi tahun 2015. Hal ini membuat realisasi PNBPN SDA Minyak Bumi tahun 2016 menjadi yang terendah sejak 10 tahun terakhir.

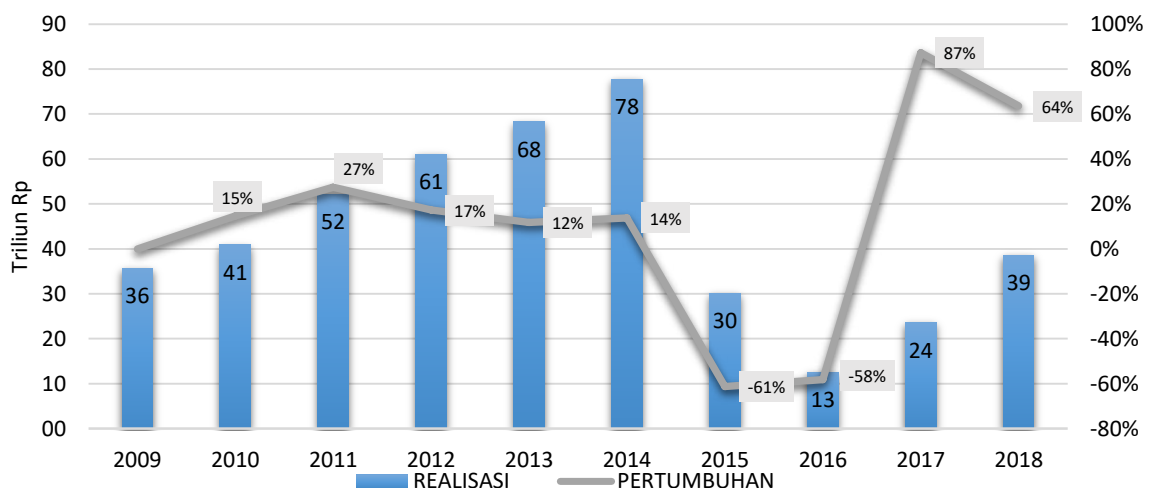
Penurunan realisasi PNBPN Minyak Bumi tahun 2015 dan 2016 salah satunya diakibatkan oleh melemahnya harga minyak dunia. Penurunan harga minyak juga dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan minyak, antara lain didorong oleh produksi shale oil di AS. Kondisi tersebut memberikan tekanan pada negara-negara pengekspor komoditas. Namun, sejak pertengahan tahun 2017, tren harga minyak mulai membaik yang berlanjut hingga tahun 2018.

Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA Minyak Bumi mulai membaik di tahun 2017. Di akhir tahun 2018, tercatat PNBPN SDA Minyak Bumi sebesar Rp104 triliun, atau mencapai 175 persen dari target sebesar Rp59 triliun. Persentase tersebut merupakan pencapaian realisasi tertinggi sejak 10 tahun terakhir.

## 2. Perkembangan Realisasi PNBPN SDA Gas Bumi

Secara umum, realisasi PNBPN gas bumi dari tahun 2009-2014 menunjukkan tren yang meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahun sebesar 18 persen. Hingga di tahun 2014 realisasi PNBPN gas bumi mencapai titik tertinggi, yaitu sebesar Rp78 triliun, atau tumbuh sebesar 14 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan PNBPN gas bumi tahun 2014 dipengaruhi oleh tingginya *lifting* gas bumi yang mencapai 1.224 bph setara minyak.

**Gambar 6. Perkembangan Realisasi PNBPN Gas Bumi 2009-2018**





Di tahun 2015, terjadi pembalikan arah tren, dimana penerimaan gas bumi mengalami penurunan yang signifikan. Rendahnya lifting gas bumi tahun 2015 juga berdampak pada penerimaan SDA gas bumi yang turun menjadi Rp30 triliun atau sebesar -61 persen dibanding penerimaan tahun sebelumnya. Tren penurunan realisasi PNBP gas bumi masih berlanjut hingga tahun 2016 dengan penerimaan sebesar Rp13 triliun dari target sebesar Rp17,3 triliun, yang merupakan penerimaan terendah sejak 10 tahun terakhir.

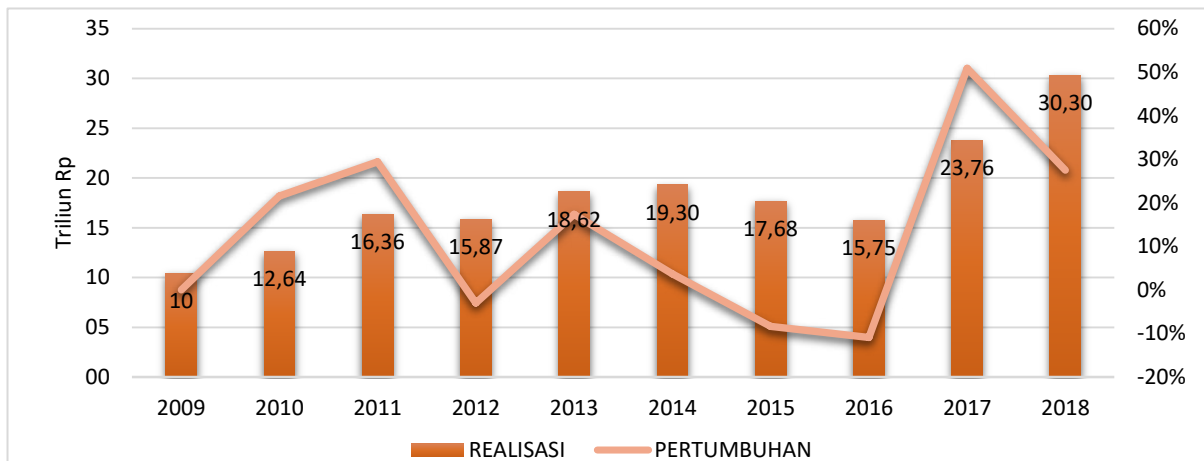
Pembalikan arah tren terjadi mulai tahun 2017, dimana penerimaan SDA gas bumi naik menjadi Rp24 triliun, atau sebesar 87 persen dari penerimaan tahun sebelumnya, dan capaian tersebut telah berhasil melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp14,8 triliun. Tren peningkatan realisasi tersebut berlanjut hingga akhir tahun 2018, dengan capaian realisasi sebesar Rp38,6 triliun dari target 20,7 triliun, atau tumbuh sebesar 64% dari capaian tahun sebelumnya.

### **3. Perkembangan Realisasi PNBP SDA Pertambangan Minerba**

Sesuai PP Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sektor Pertambangan Umum, jenis pungutan pada sektor pertambangan minerba antara lain pungutan iuran tetap, iuran eksplorasi, dan iuran produksi/royalti.

Realisasi PNBP pertambangan mineral dan batu bara dalam kurun waktu 2009-2018 mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan, PNBP pertambangan minerba naik dari Rp10,4 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp30,3 triliun pada tahun 2018 atau meningkat hampir 200 persen dalam satu dekade terakhir. Realisasi PNBP pertambangan minerba tersebut tidak terlepas dari meningkatnya volume produksi minerba di Indonesia, ekspor ke berbagai negara tujuan utama terutama China dan Eropa serta dampak dari depresiasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika selama periode 2009-2018. Sumber utama PNBP pertambangan minerba diperoleh dari iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi.

**Gambar 7 . Perkembangan Realisasi PNBP Pertambangan Minerba 2009-2018**



Sumber : LKPP 2009-2017 dan APBN Kita 2019

Realisasi PNBP pertambangan dan minerba juga terlihat tumbuh relatif signifikan dalam satu dekade terakhir. Rata-rata realisasi PNBP pertambangan minerba tumbuh sebesar 13 persen per tahun. Sektor minerba menyumbang PNBP terbesar ketiga setelah minyak bumi dan gas. Rata-rata sumbangan PNBP pertambangan minerba sebesar Rp18,074 triliun per tahun. Jika dilihat dari jumlah, PNBP pertambangan minerba tertinggi dicapai pada tahun 2018 sebesar Rp30,3 triliun dan terendah pada tahun 2009 sebesar Rp10,4 triliun.

Sejak 2009, PNBP pertambangan minerba menunjukkan tren yang meningkat atau naik dari Rp10,4 triliun menjadi Rp16,36 triliun pada 2011. Kenaikan selama tiga tahun tersebut terhenti dan kemudian mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3 persen atau berkurang menjadi Rp15,9 triliun pada tahun 2012. Pada tahun 2013 dan 2014 kembali meningkat masing-masing sebesar 17 persen dan empat persen atau menjadi Rp18,62 dan Rp19,30 triliun. Tren penurunan kembali terjadi pada 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp17,68 dan Rp15,75 atau berkurang masing-masing sebesar minus 8 dan 11 persen. Pada tahun 2017 dan 2018, realisasi PNBP kembali meningkat sangat signifikan masing-masing menjadi Rp23,76 triliun dan Rp30,3 triliun atau sebesar 50 dan 28 persen. Pertumbuhan PNBP pertambangan minerba tertinggi dicapai pada tahun 2017 dan terendah pada tahun 2016 dengan minus 11 persen.

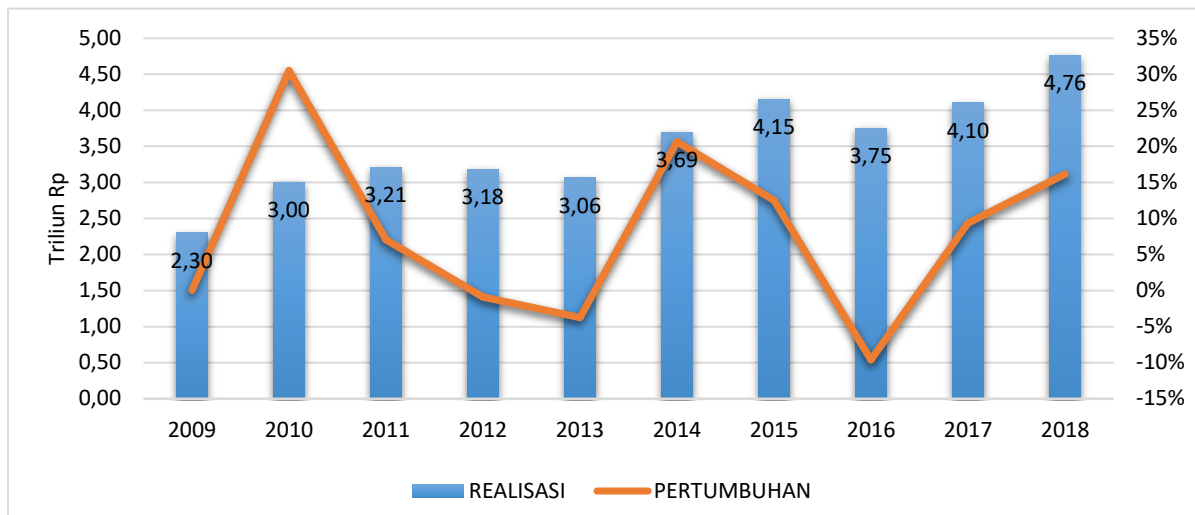
#### **4. Perkembangan Realisasi PNBP SDA Kehutanan**

Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan tertuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku pada Kementerian Kehutanan, diantaranya yaitu Dana Reboisasi, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Hak Pengusahaan Hutan/Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IHPH/IIUPH), dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).

Pada gambar 8 terlihat bahwa realisasi PNBP SDA kehutanan masih di bawah 5 triliun dalam sepuluh tahun terakhir. Realisasi tertinggi dicapai pada tahun 2018 sebesar Rp4,76 triliun dan terendah Rp2,3 triliun pada tahun 2009. Dalam satu dekade terakhir terlihat realisasi PNBP SDA kehutanan fluktuatif. Dari tahun 2009-2011 tumbuh positif atau dari Rp2,3 triliun menjadi Rp3,21 triliun atau masing-masing tumbuh sebesar 30 dan 7 persen. Pada tahun 2012, PNBP SDA kehutanan tumbuh negatif atau turun menjadi Rp3,18 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan berlanjut hingga 2013 sebesar minus 4 persen atau berkurang menjadi Rp3,06 triliun.

**Gambar 8. Perkembangan Realisasi PNBP Kehutanan 2009-2018**



Sumber : LKPP tahun 2010-2017 dan APBN Kita 2019

Setelah mengalami penurunan pada 2012-2013, realisasi PNBP SDA kehutanan terlihat tumbuh positif pada dua tahun berikutnya yaitu 2014-2015 di mana masing-masing naik menjadi Rp3,69 triliun dan Rp4,15 triliun. Pada periode tersebut realisasi PNBP SDA kehutanan mampu tumbuh signifikan masing-masing 21 persen dan 12 persen. Namun demikian, tren pertumbuhan positif belum bisa dipertahankan pada tahun 2016. Realisasi PNBP SDA kehutanan kembali mengalami kontraksi sebesar minus 10 persen atau turun menjadi Rp3,75 triliun. Kemudian dalam 2 tahun terakhir 2017-2018, realisasi PNBP SDA kehutanan dapat tumbuh positif kembali atau masing-masing naik sebesar 9 dan 16 persen.

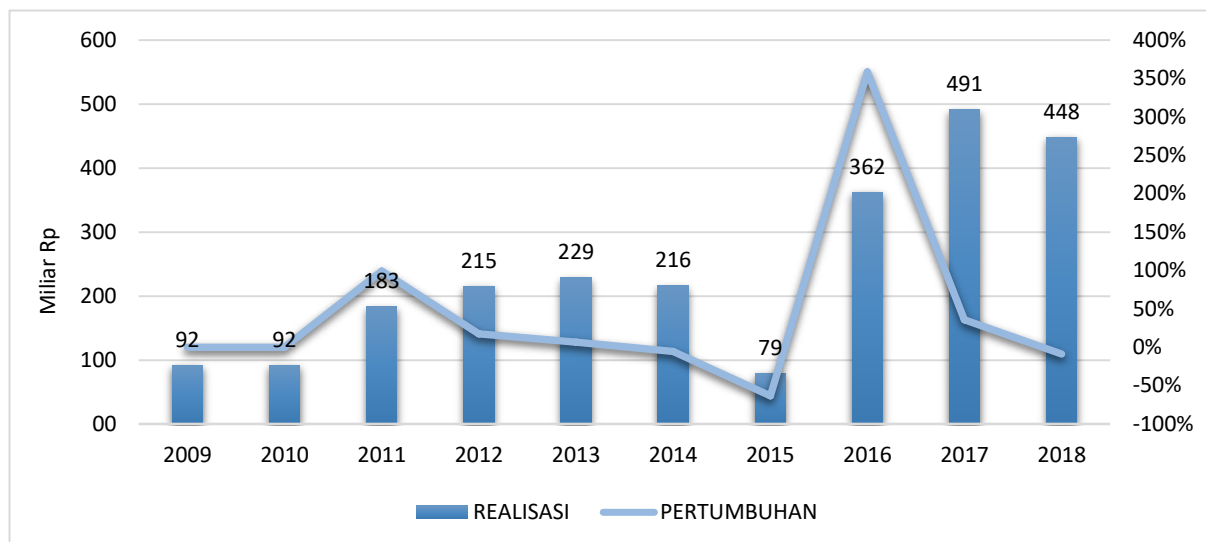
Realisasi PNBP SDA kehutanan yang bersumber dari dana reboisasi (DR), provisi sumberdara hutan (PSDH), iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH) dan

penggunaan kawasan hutan (PKH) tertinggi dicapai pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2009. Namun demikian, pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2010 sebesar 30 persen dan terendah minus 10 persen pada tahun 2016.

## 5. Perkembangan Realisasi PNBP SDA Perikanan

Perkembangan PNBP SDA perikanan dapat dilihat pada gambar 9. Realisasi PNBP SDA perikanan dalam kurun waktu 2009-2018 sangat fluktuatif. Meskipun Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki luas laut dan garis pantai terpanjang di dunia, namun sumbangan PNBP SDA perikanan dalam satu dekade terakhir belum menyentuh angka setengah triliun rupiah.

**Gambar 9. Perkembangan Realisasi PNBP Perikanan 2009-2018**



Sumber : LKPP 2009-2017 dan APBN Kita 2019

Dari tahun 2009-2015, realisasi PNBP SDA perikanan belum mampu meningkat signifikan. Selama periode tersebut, realisasi PNBP SDA perikanan rata-rata hanya sebesar Rp158 miliar atau lebih rendah dibandingkan dengan realisasi dalam tiga tahun terakhir dengan capaian rata-rata sebesar Rp433 miliar.

Dalam satu dekade terakhir, PNBP SDA perikanan tumbuh sebesar 19 persen pertahun. SDA perikanan merupakan salah satu sektor penyumbang PNBP yang pertumbuhannya relatif lebih cepat dibandingkan dengan sektor lain seperti minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan kehutanan. Realisasi PNBP SDA perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2017 sebesar Rp491 miliar dan terendah pada tahun 2015 sebesar Rp79 miliar.

Selama periode 2009-2013, realisasi PNBPN SDA perikanan menunjukkan tren yang meningkat. Setelah sempat stagnan dalam dua tahun 2009-2010 di mana realisasi sebesar Rp92 miliar, pada tahun 2011 mampu mencapai realisasi sebesar Rp183 triliun atau tumbuh sebesar 99 persen. Kemudian pada tahun 2012-2013 masih menunjukkan perkembangan positif dimana realisasi PNBPN SDA perikanan masing-masing tumbuh sebesar 17 persen dan 7 persen atau naik menjadi Rp215 miliar dan Rp229 miliar. Baru kemudian pada tahun 2014-2015 realisasi PNBPN SDA perikanan menurun sangat drastis masing-masing sebesar minus 6 persen dan 63 persen.

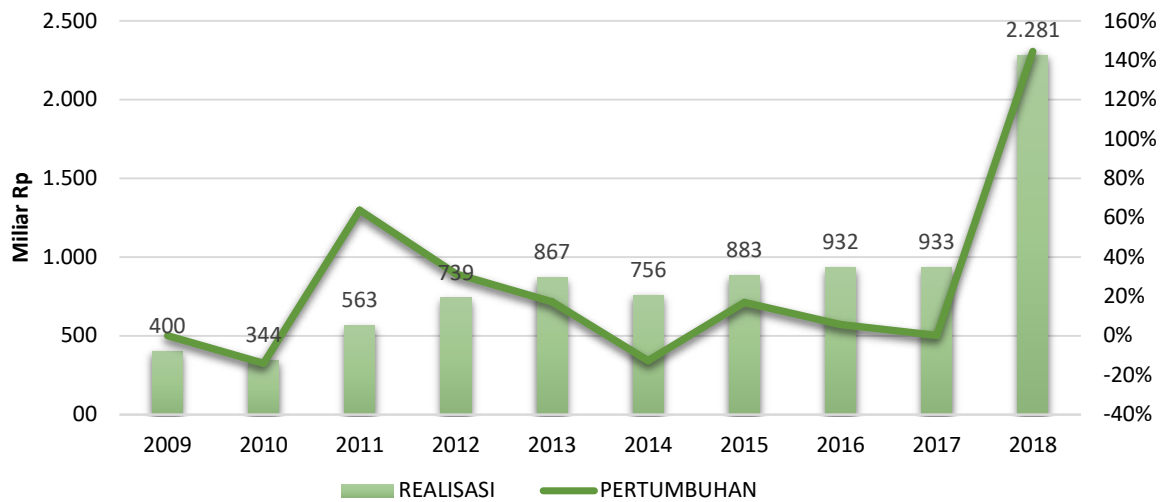
Berkurangnya realisasi PNBPN SDA kehutanan pada tahun 2015 tersebut tidak berlanjut pada tahun berikutnya. Pada tahun 2016, capaian realisasi meningkat tajam sebesar 358 persen atau naik menjadi Rp362 miliar. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2017 sebesar 36 persen menjadi Rp491 miliar. Namun demikian, pada tahun 2018 kembali mengalami kontraksi sebesar minus 9 persen sehingga capaian realisasi PNBPN SDA perikanan hanya mencapai Rp448 miliar.

## **6. Perkembangan Realisasi PNBPN SDA Panas Bumi**

SDA panas bumi merupakan salah satu sektor yang tumbuh relatif lebih cepat terhadap penerimaan PNBPN SDA non migas dalam rentang waktu 2009-2018. Rata-rata realisasi PNBPN SDA panas bumi yang bersumber dari setoran bagian pertambangan, iuran pertambangan dan iuran produksi/royalti pertambangan panas bumi tumbuh 21 persen per tahun. Dalam satu dekade terakhir, PNBPN SDA panas bumi rata-rata menyumbang Rp872 miliar per tahun bagi penerimaan negara.

Pada gambar 10 terlihat bahwa realisasi PNBPN SDA panas bumi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini berbeda dengan realisasi PNBPN SDA lainnya yang cenderung fluktuatif. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, capaian PNBPN SDA panas bumi sudah di atas dua triliun rupiah. Dari gambar 10 tersebut terlihat dengan jelas bahwa hanya pada tahun 2010 dan tahun 2014 realisasi PNBPN SDA panas bumi mengalami penurunan masing-masing sebesar 14 persen dan 13 persen.

**Gambar 10. Perkembangan Realisasi PNBP Panas Bumi 2009-2018**



Sumber : LKPP tahun 2009-2017 dan APBN Kita 2019

Realisasi PNBP SDA panas bumi tertinggi dicapai pada tahun 2018 sebesar Rp2,280 triliun dan terendah sebesar Rp344 triliun pada tahun 2010. Sejak mengalami penurunan realisasi pada tahun 2010, pada periode 2011-2013 tren realisasi naik sangat signifikan lebih dari dua kali lipat hanya dalam waktu empat tahun. Kenaikan pada tahun 2011 sangat signifikan mencapai 64 persen atau menjadi Rp563 miliar dibanding tahun sebelumnya. Kemudian kembali meningkat dalam dua tahun berikutnya masing-masing Rp739 dan Rp867 miliar pada 2012 dan 2013. Setelah sempat turun kembali pada tahun 2014, realisasi PNBP SDA panas bumi kembali naik menjadi Rp883 miliar pada tahun 2015 atau tumbuh sebesar 17 persen. Kenaikan terus berlanjut hingga tiga tahun berikutnya masing-masing Rp932 miliar, Rp933 miliar dan Rp2.281 miliar. Pada tahun 2018 realisasi PNBP SDA panas bumi mencapai 144 persen.







**PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT  
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635**

**[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)**

**EMAIL: [puskaji.anggaran@dpr.go.id](mailto:puskaji.anggaran@dpr.go.id)**